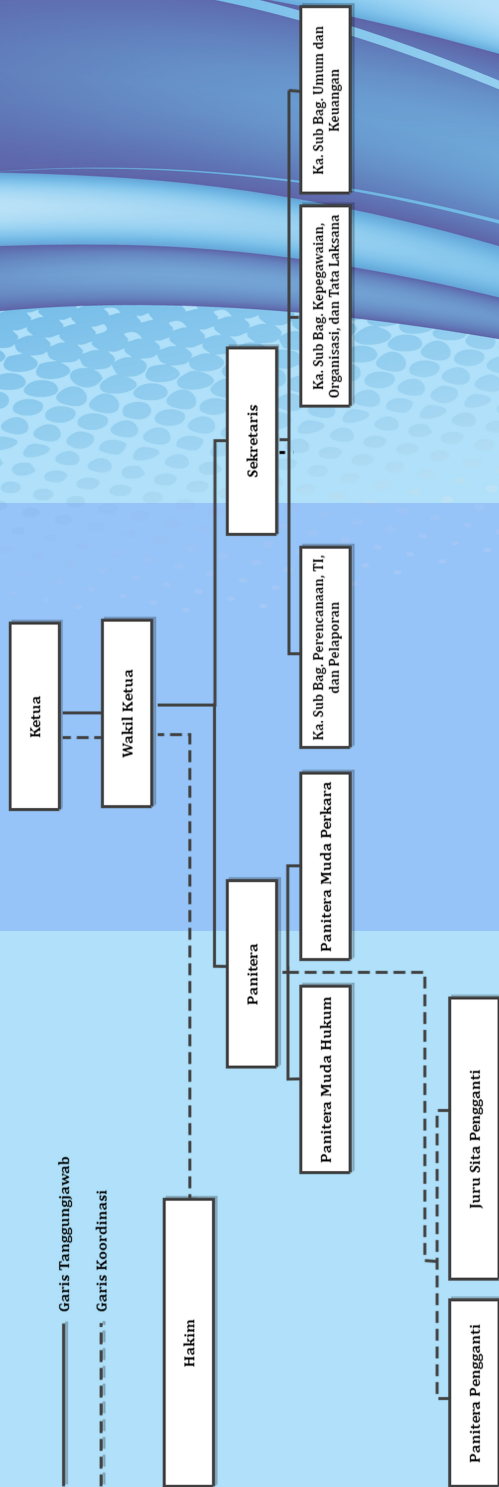
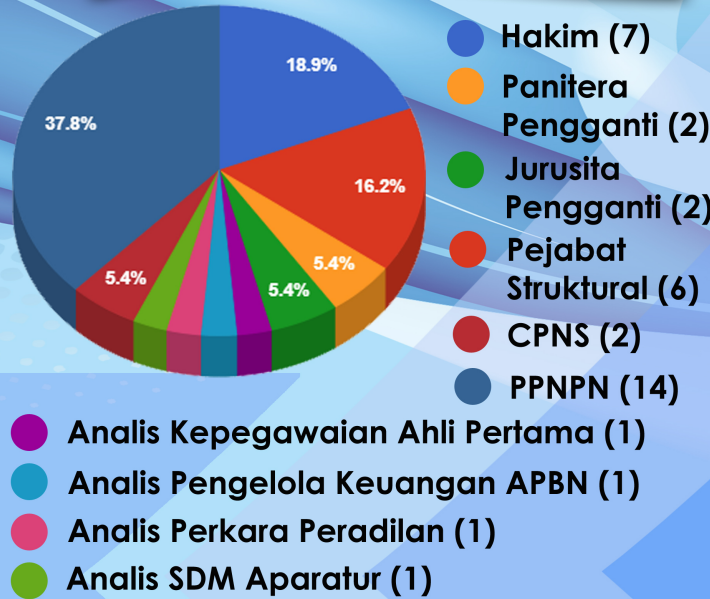


# STRUKTUR ORGANISASI



## STATISTIK KEPEGAWAIAN



## WILAYAH YURIDIKSI

### PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

1. Pemerintah Kota Samarinda
2. Pemerintah Kota Balikpapan
3. Pemerintah Kota Bontang
4. Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kabupaten Paser
6. Kabupaten Berau
7. Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kutai Barat
9. Kabupaten Kutai Timur
10. Kabupaten Mahakam Ulu



### PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. Pemerintah Kota Tarakan
2. Kabupaten Nunukan
3. Kabupaten Malinau
4. Kabupaten Bulungan
5. Kabupaten Tana Tidung



## PROFIL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA



Jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda - Kalimantan Timur  
Kodepos 75132 Telp. 0541-262062 / Fax. 0541-260659



[informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)



<https://ptun-samarinda.go.id>



PTUN Samarinda



PTUN Samarinda



[ptun.samarinda](https://www.instagram.com/ptun.samarinda)



PtunSamarinda



# VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Agung dan Modern"

# MISI

1. Menjaga kemandirian dan integritas badan peradilan
2. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan bagi pencari keadilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

# MOTTO

# "H E B A T"

Harmonis  
Energik, Efektif, Efisien  
Berintegritas  
Adil, dan Akuntabel  
Transparan

# SEJARAH

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdiri, semua sengketa tata usaha negara yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha negara di wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal tersebut sesuai pasal 2 **SK Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1992** tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado yang menyebutkan :

*"Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat didalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah, dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur "*

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka selanjutnya tahun 1994, terbitlah **Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994** yaitu tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar

*"Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur"*

Atas dasar surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 tersebut maka dibangunlah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terletak di Jalan Bung Tomo Nomor 136 Samarinda Seberang, dan pada tanggal **10 Juni 1995** Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diresmikan oleh Menteri Kehakiman OETOYO USMAN, S.H.

*Dan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, sebagian wilayah Kalimantan Timur menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara.*

*"Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:*

- a. Kabupaten Bulungan;
- b. Kota Tarakan;
- c. Kabupaten Malinau;
- d. Kabupaten Nunukan; dan
- e. Kabupaten Tana Tidung."

Kemudian pada tahun 2018, terbit **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200 Tahun 2018** tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, yang menegaskan bahwa Kalimantan Utara merupakan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

# PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## Layanan Kepaniteraan Meja 1

Pendaftaran

1. Perkara Tingkat Pertama
2. Upaya Hukum
  - Banding
  - Kasasi
  - Peninjauan Kembali

## Meja 3

- Pemberitahuan
- Pengiriman Berkas

## Kasir

- Penerimaan Bukti Pembayaran
- Pembayaran Sisa Panjar
- Pembukuan

## Layanan Kesekretariatan & Umum

Layanan Persuratan dan lainnya

## Layanan Informasi dan Pengaduan

- Layanan Meja Informasi
- Layanan Meja Pengaduan
- Pendaftaran Surat Kuasa

## Layanan Helpdesk e-Court